

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan sasaran pembangunan ekonomi yang mampu mengembangkan dan memajukan perekonomian di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, dalam hal ini bukan kesejahteraan segolongan orang tertentu atau perorangan saja melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Hal tersebut menandakan bahwa bank sangat penting dalam pembangunan nasional karena pengertian bank dalam UU No. 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Bank juga dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 25.

menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.²

Menurut Dendawijaya³ dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola bank. Oleh karena itu semakin besar dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat menunjukkan besarnya kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya di bank. Dari berbagai sumber dana yang berhasil dihimpun oleh bank, kemudian bank menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat sebagian besar di alokasikan untuk kredit. Kegiatan pemberian kredit merupakan rangkaian kegiatan utama suatu bank, dimana pemberian kredit adalah tulang punggung kegiatan perbankan.

Menurut Kasmir⁴ di Indonesia terdapat dua jenis bank ditinjau dari prinsipnya, yang pertama adalah bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kepada pihak-pihak kekurangan dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang kedua adalah bank syariah, bank syariah adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada pihak-pihak kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan rakyat dan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer,

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005, hlm. 25.

³ Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 49.

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 40.

teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.⁵

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tertulis pula bahwa bank umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah (bank syariah).⁶ Jika dicermati dari kedua macam bank tersebut, terdapat perbedaan yang sangat mencolok dari tata cara beroperasi dengan pandangan dan prinsip yang berbeda pula. Walaupun keduanya sama-sama diregulasi oleh Bank Indonesia.

Bank konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa. Balas jasa yang diterima oleh bank atas penyaluran dana kepada masyarakat, maupun balas jasa yang dibayar oleh bank kepada masyarakat atas penghimpunan dana. Di samping itu, untuk mendapatkan keuntungan dari pelayanan jasanya, bank konvensional akan membebankan *fee* kepada nasabahnya.⁷ Pada pemberian kredit yang dilakukan oleh bank konvensional, unsur bunga sangatlah berperan penting, dengan demikian bahwa bunga dalam bank konvensional diakui sebagai pendapatan.

⁵ Antonio, Muhammad Syafe'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 29.

⁶ Taswan, *Manajemen Perbankan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006, hlm. 5.

⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 19.

Tetapi, tingkat suku bunga yang fluktuatif kadang-kadang menjadi masalah di bank konvensional dalam memberikan atau mengajukan persentase bunga dari pemberian kredit yang dilakukan.

Krisis yang melanda dunia perbankan di Indonesia sejak tahun 1997 telah menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan, tetapi ada sistem perbankan lain yang lebih tangguh karena menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan, yaitu perbankan syariah yang tidak memakai sistem bunga.

Perbankan syariah mempunyai prinsip bagi hasil yang berbeda dengan perbankan konvensional, yang ternyata lebih tangguh dan terbukti mampu bertahan pada saat krisis moneter. Bahkan, sistem perbankan syariah saat ini lebih berkembang dan menjadi alternatif menarik bagi kalangan pengusaha sebagai pelaku bisnis, akademisi sebagai penyedia sumber daya manusia dan masyarakat sebagai penyedia sumber daya manusia dan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan.

Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif.⁸ Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah

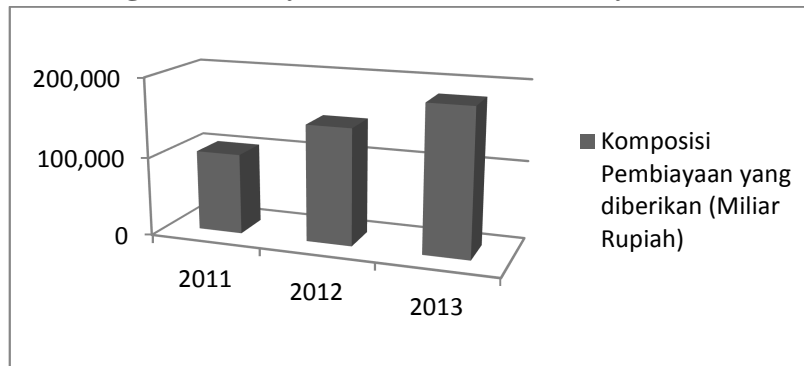
⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hlm.13.

dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, perbankan syariah saat ini masih berada pada tahap perkembangan dengan tetap gencar untuk meningkatkan pangsa, salah satunya dari sisi pembiayaan. Selama tahun 2013 perbankan syariah, yang merupakan instrumen pengembangan ekonomi nasional telah mampu memberikan dukungan besar terhadap pengembangan sektor riil yang ada selama ini. BI mencatat pada bulan Desember 2013 total aset perbankan syariah sudah mencapai Rp 242.276 milyar (Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah). Dorongan untuk meningkatkan pangsa inilah kemudian bank syariah memerlukan analisa yang lebih matang baik dalam konteks persaingan dengan bank konvensional maupun dalam konteks merespon kondisi pasar.

Sektor perbankan sebagai pihak *intermediary institution*, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan, menempati posisi yang sangat penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja investasi di sektor riil dengan pemilik dana. Hal ini tentu akan menjadikan uang lebih efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Sebagai lembaga perantara, perbankan syariah menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan.

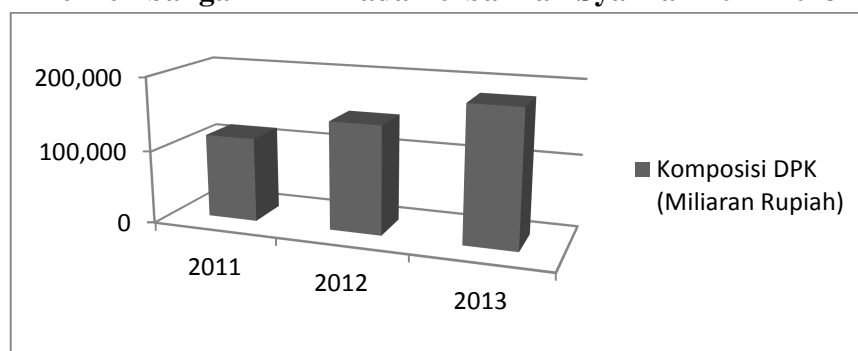
Grafik I.1
Perkembangan Pembiayaan Pada Perbankan Syariah 2011-2013



Sumber : bi.go.id, laporan Pembiayaan tahun 2014

Dari grafik I.1, persentase pembiayaan perbankan syariah di Indonesia terus meningkat. Meningkatnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank tidak terlepas dari Dana Pihak Ketiga yang meningkat pula. Dana Pihak Ketiga pada umumnya merupakan sumber dana terbesar dan sebagai fondasi eksistensi bank. Hal tersebut bisa terwujud jika bank mampu menarik dana masyarakat sebanyak-banyaknya dan bisa mengelola Dana Pihak Ketiga (DPK) secara optimal. Fenomena yang terjadi sekarang memperlihatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan semakin baik yang ditandai dengan semakin meningkatnya keberadaan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Grafik I.2
Perkembangan DPK Pada Perbankan Syariah 2011-2013



Sumber : bi.go.id, laporan DPK tahun 2014

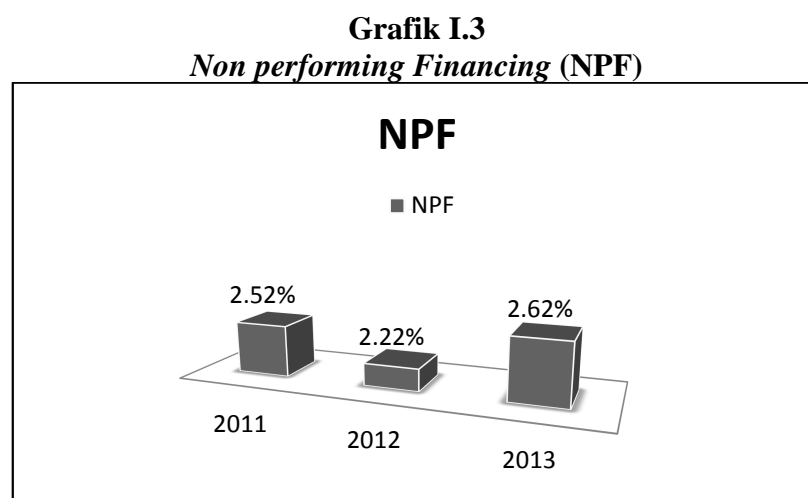
Berdasarkan grafik I.2, Dana Pihak Ketiga (DPK) setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan pada tahun 2013 hingga mencapai Rp 183.534 (miliar). Keberadaan Dana Pihak Ketiga (DPK) ini mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan pendapatan bank, karena dari Dana Pihak Ketiga (DPK) kemudian disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang disalurkan bank akan mendapatkan tingkat pengembalian berupa bagi hasil. Selanjutnya besar kecilnya bagi hasil akan sangat mempengaruhi besar kecilnya profitabilitas. Oleh karena kemudian optimalisasi Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi sangat penting di dalam meningkatkan profitabilitas.

Dalam praktik penyaluran pembiayaan tidaklah semudah teorinya, karena dalam kenyataannya banyak pembiayaan yang macet atau bermasalah, beberapa penyebabnya yaitu kurangnya penilaian dan pengawasan bank kepada nasabah. Selain itu karakteristik nasabah yang tidak sama juga sangat berpengaruh. Karena pada kenyataannya ada nasabah yang cakap mengelola bisnis ada pula yang tidak. Oleh karena itu banyak nasabah yang tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sehingga disebut dengan pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) sangat berhubungan dengan pengendalian biaya dan sekaligus pula berhubungan dengan kebijakan pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank itu sendiri. Karena besarnya NPF akan mempengaruhi besarnya pembiayaan yang akan disalurkan pada periode mendatang. Semakin tinggi NPF yang dimiliki bank

maka semakin rendah pembiayaan yang disalurkan, sedangkan kredit semakin meningkat. NPF yang rendah menyebabkan bank menurut cadangan penghapusan yang lebih sedikit sehingga dana yang dapat disalurkan lewat pemberian pembiayaan semakin meningkat.

Untuk laju *Non performing Financing* (NPF) pada tahun 2011-2013 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber : bi.go.id, laporan NPF tahun 2014

Dari grafik I.3, persentase NPF perbankan syariah di Indonesia terus berfluktuasi, pada tahun 2011 berada pada kisaran 2.52%. Sedangkan pada tahun 2012 tingkat NPF perbankan syariah di Indonesia tidak lebih dari 2.22%, tetapi pada tahun 2013 NPF mulai mengalami kenaikan lagi hingga menyentuh angka 2.62%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Wuri Arianti Novi Pratami (2011) yang meneliti tentang Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) terhadap Pembiayaan menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan, CAR, NPF serta ROA tidak berpengaruh terhadap

pembiayaan, tetapi secara simultan semua variabel yakni DPK, CAR, NPF, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Selanjutnya Dida Yunta Hendrasman (2008) yang meneliti Simpanan, Modal Sendiri, *Non Performing financing* (NPF), Persentase Bagi Hasil dan *Mark Up* Keuntungan terhadap Pembiayaan menunjukkan jika DPK dan Modal Sendiri memiliki pengaruh yang signifikan hanya dalam jangka panjang, sedangkan dalam jangka pendek tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan. NPF juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan baik dalam jangka panjang ataupun jangka pendek.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, diketahui DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan, NPF tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan, tetapi keduanya secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan, maka penulis menguji kembali untuk membuktikan kebenaran kedua penelitian tersebut bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan, NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan, tetapi DPK dan NPF secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan menarik judul **“Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

a. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini hanya akan membahas pengaruh dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dari bulan Januari 2011 hingga desember 2013.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia Tahun 2011 - 2013 ?
- 2) Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia Tahun 2011 - 2013 ?
- 3) Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia Tahun 2011-2013 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan perbankan syariah di Indonesia tahun 2011-2013.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan perbankan syariah di Indonesia tahun 2011-2013.

- 3) Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan perbankan syariah di Indonesia tahun 2011 – 2013.

D. Kontribusi Penelitian

1) Bagi Penulis

Untuk membuka wawasan berfikir peneliti, serta menambah pengetahuan dan pemahaman dibidang penelitian, sekaligus sebagai penerapan pengetahuan yang telah diterima dan dipelajari selama menempuh perkuliahan jurusan Ekonomi Islam IAIN Raden Fatah Palembang.

2) Bagi Almamater

Sebagai sumbangsih bagi keilmuan khususnya Ekonomi Islam mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan.

3) Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan bacaan atau rujukan peneliti yang akan datang dan digunakan sebagai bahan perbandingan dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan perbankan.

E. Metodologi Penelitian

1) Jenis Penelitian

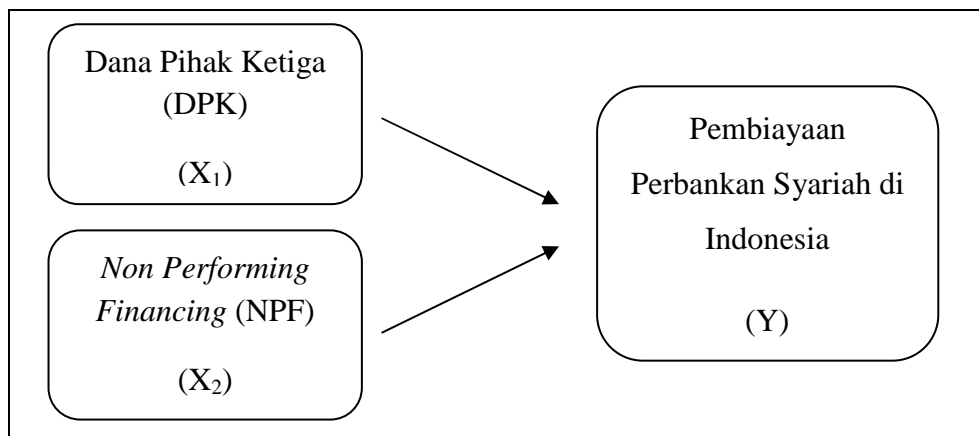
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yakni penelitian yang menganalisis data-data secara kuantitatif kemudian

menginterpretasikan hasil analisis tersebut untuk memperoleh suatu kesimpulan biasanya dalam bentuk angka.⁹ Jenis penelitian kuantitatif dalam penelitian ini adalah mengolah data Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) dan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2011–2013. Kemudian menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu mengambil kesimpulan dari hasil analisis data-data tersebut.

2) Kerangka Pikir

Penelitian dilakukan secara sistematis dengan proses sebagai berikut :

Bagan I.1



Sumber : Dikembangkan dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non performing Financing* (NPF) diduga secara bersama-sama mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

3) Jenis dan Sumber Data

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bentuk yang sudah jadi,

⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2005.

sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain.¹⁰ Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah Indonesia selama periode 2011 sampai dengan 2013 dan dari website resmi Bank Indonesia yaitu www.bi.go.id.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif, yaitu data DPK perbankan syariah di Indonesia tahun 2011-2013, data *Non performing Financing* (NPF) perbankan syariah di Indonesia tahun 2011-2013, dan data pembiayaan perbankan syariah di Indonesia tahun 2011-2013.

4) Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu metode yang menghimpun informasi dan data melalui metode studi pustaka laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia.¹¹ Data Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non performing Financing* (NPF) dan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia diperoleh dengan cara mengutip langsung dari Statistik Perbankan Syariah tahun 2011 sampai dengan 2013.

5) Variabel – Variabel Penelitian

a. Variabel Bebas

a) Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan

¹⁰ Ibid, hlm. 132.

¹¹ Ibid, hlm. 158.

operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. DPK diperoleh rumus sebagai berikut¹²:

$$DPK = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

b) *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. NPF diperoleh rumus sebagai berikut¹³:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

b. Variabel Tak Bebas (Pembiayaan)

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁴

¹² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002, hlm. 64.

¹³ http://eprints.undip.ac.id/32445/1/jurnal_wuri.pdf, diakses November 2014.

¹⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 2007, hlm. 242

6) Metode Analisis Data

a. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi).¹⁵

b. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Multikolinieritas

Uji asumsi klasik jenis ini diterapkan untuk analisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel independen (bebas) ($X_1, X_2, X_3, X_4, \dots, X_n$). Dimana akan diukur tingkat asosiasi (keeratan) hubungan atau pengaruh antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Dikatakan terjadi multikolinieritas, jika koefisien korelasi antar variabel bebas (X_1 dan X_2 , X_2 dan X_3 , X_3 dan X_4 , dan seterusnya) lebih besar dari 0,60. Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas, jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 ($r \leq 0,60$). Atau dalam menentukan ada tidaknya multikolinieritas dapat digunakan cara lain yaitu dengan:

- 1) Nilai *tolerance* adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik.

¹⁵ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, hlm. 19.

- 2) Nilai *variance inflation factor* (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat.

Nilai *tolerance* dan VIF dapat dicari dengan menggabungkan kedua nilai tersebut sebagai berikut:

- 1) Besar nilai *tolerance* = $1/VIF$
- 2) Besar nilai VIF = $1/\text{nilai } tolerance$

Variabel bebas mengalami multikolinieritas jika nilai *tolerance* hitung $<$ nilai *tolerance* dan VIF hitung $>$ VIF. Variabel bebas tidak mengalami multikolinieritas jika nilai *tolerance* hitung $>$ nilai *tolerance* dan VIF hitung $<$ VIF.¹⁶ (Sunyoto, 2011: 133).

b) Uji Autokorelasi

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Masalah autokorelasi baru timbul jika ada korelasi secara linier antara kesalahan pengganggu periode t (berada) dengan kesalahan pengganggu periode $t-1$ (sebelumnya). Salah satu ukuran ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut¹⁷ (Sunyoto, 2011: 134):

- 1) Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 ($DW < -2$).

¹⁶ Suyanto Sunyoto, *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*, Yogyakarta: Caps, 2011, hlm. 133.

¹⁷ Ibid, hlm. 134.

- 2) Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau $-2 < DW \leq \pm 2$.
- 3) Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW diatas +2 atau $DW > +2$

DurbinWatson test dilakukan dengan membuat hipotesis:

H_0 : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_a : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

c) Uji Heterokedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama disebut terjadi homoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama atau berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Analisis uji asumsi heteroskedastisitas hasil output SPSS melalui grafik *scatterplot* antara *Z prediction* (ZPRED) yang merupakan variabel bebas (sumbu X = Y hasil prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) merupakan variabel terikat (sumbu Y = Y prediksi – Y rill). Homoskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar dibawah maupun diatas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. Heteroskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titiknya mempunyai pola yang teratur

baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang.¹⁸
(Sunyoto, 2011: 134).

d) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui suatu populasi suatu data dapat dilakukan dengan analisis grafik. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram dan normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal.¹⁹ Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusannya:

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

¹⁸ Suyanto Sunyoto, *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*, Yogyakarta: Caps, 2011, hlm. 134.

¹⁹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, hlm. 147.

- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Selain itu, untuk menguji normalitas data dapat digunakan uji statistik Kolmogorov Smirnov (K-S) yang dilakukan dengan membuat hipotesis nol (H_0) untuk data berdistribusi normal dan hipotesis alternatif (H_a) untuk data berdistribusi tidak normal. Dengan uji statistik yaitu dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Hipotesis yang dikemukakan:

H_0 = data residual berdistribusi normal (Asymp. Sig > 0,05)

H_a = data residual tidak berdistribusi normal (Asymp. Sig < 0,05)

e) Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah melalui uji asumsi klasik, yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas, serta data telah terdistribusi normal, maka data yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisa dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen untuk memprediksi nilai rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini

diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan satu persamaan. Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen. Adapun model dasarnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y : Pembiayaan

A : konstanta persamaan regresi

$\beta_1 - \beta_2$: koefisien variabel independen

X1 : Dana Pihak Ketiga (DPK)

X2 : *Non Performing Financing* (NPF)

e : Variabel pengganggu atau faktor-faktor di luar variabel yang tidak dimasukkan sebagai variabel model di atas (kesalahan residual).

Besarnya konstanta dicerminkan oleh “a” dan besarnya koefisien regresi dari masing-masing variabel independen ditunjukkan dengan β_1 , β_2 . Pada model persamaan di atas, dapat diketahui tanda positif atau negatif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien regresi dalam penelitian ini sangat menentukan sebagai dasar analisis. Mengingat penelitian ini bersifat fundamental method. Hal ini

berarti, jika koefisien β bernilai positif, maka dapat dikatakan terjadi pengaruh searah antara variabel bebas dengan variabel terikat (dependen), setiap kenaikan nilai variabel bebas akan mengakibatkan kenaikan variabel terikat (dependen), demikian pula sebaliknya, bila koefisien nilai β bernilai negatif hal ini menunjukkan adanya pengaruh negatif dimana kenaikan nilai variabel bebas akan mengakibatkan penurunan nilai variabel terikat (dependen).

f) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel dependen yang dimasukkan dalam model. Setiap penambahan satu variabel independen R^2 pasti meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* R^2 pada

saat mengevaluasi model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai *adjusted* R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.²⁰

Dalam penelitian ini digunakan *Adjusted* R^2 karena nilai variabel bebas yang diukur terdiri dari nilai rasio absolut dan nilai perbandingan. Kegunaan *Adjusted* R^2 adalah:

- 1) Sebagai ukuran ketepatan garis regresi yang diterapkan suatu kelompok data hasil *survey*. Semakin besar nilai *Adjusted* R^2 , maka akan semakin tepat suatu garis regresi dan sebaliknya.
- 2) Untuk mengukur besarnya proporsi atau persentase dari jumlah variasi dari variabel dependen, atau untuk mengukur sumbangan dari variabel dependen terhadap variabel independen.

g) Pengujian Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari nilai koefisien determinan (R^2), nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.²¹

²⁰ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, hlm. 87.

²¹ Ibid, hlm. 87.

h) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

Artinya apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau:

$$H_a : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.²² Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut²³:

- 1) *Quick look*: bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan, bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

²² Ibid, hlm. 88.

²³ Ibid, hlm. 88.

- 2) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

i) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan hipotesis sebagai berikut²⁴:

- a. Hipotesis nol atau $H_0 : b_i = 0$ artinya variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Hipotesis alternatif atau $H_a : b_i \neq 0$ artinya variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Untuk mengetahui kebenaran hipotesis digunakan kriteria bila t hitung $>$ t tabel maka menolak H_0 dan menerima H_a . Artinya ada pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen dengan derajat keyakinan yang digunakan 5% dan sebaliknya jika t hitung $<$ t tabel berarti menerima H_0 dan menolak H_a . Dalam menerima atau menolak hipotesis yang diajukan dengan melihat hasil output SPSS, kita dapat hanya melihat nilai dari signifikan uji t masing-masing variabel. Jika nilai signifikan $<$ 0,05 maka dapat kita simpulkan bahwa menolak H_0 dan menerima H_a .²⁵

²⁴ Ibid, hlm. 88.

²⁵ Ibid, hlm. 89.